

LAPORAN KEUANGAN

Tahun 2024 (Audited)



Jl. Prof. Moh. Yamin No. 47 Kisaran, Kab. Asahan

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran

Untuk Periode yang Berakhir per
31 Desember 2024

KATA PENGANTAR



MUHAMMAD IQBAL
Plh. Kepala KPKNL Kisaran

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran /Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran adalah salah satu entitas pelaporan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kisaran, 7 Mei 2025

Plh. Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
MUHAMMAD IQBAL



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	V. Catatan Atas Laporan Keuangan	7
Daftar Isi	ii	Penjelasan Umum	7
Pernyataan Tanggung Jawab	iii	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	23
Ringkasan Laporan	1	Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	31
I. Laporan Realisasi Anggaran	3	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	41
II. Neraca	4	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	46
III. Laporan Operasional	5	Pengungkapan Penting Lainnya	48
III. Laporan Perubahan Ekuitas	6	Lampiran	50



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN
JALAN PROF. H. M. YAMIN S.H. NO. 47 KODE POS 21219 TELEPON (0623) 41660 FAKSIMILE 0623- 42520

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun 2024 (*Audited*) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Laporan Keuangan Tahun 2024 sebagaimana terlampir, merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Tahun 2024 (*Audited*) tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kisaran, 7 Mei 2025
Plh. Kepala Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang
Kisaran



Ditandatangani secara elektronik
Muhammad Iqbal



Laporan Keuangan KPKNL Kisaran Tahun 2024 (Audited) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintahan, Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2024 (Audited) adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.821.130.993,00 atau mencapai 163,54 % dari Estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.725.003.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2024 (Audited) adalah sebesar Rp4.348.022.204,00 atau mencapai 94,91 % dari alokasi anggaran sebesar Rp4.581.360.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp16.638.600.161,00 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp155.105.843,00, Aset Tetap (neto) sebesar Rp16.483.494.318,00; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0,00 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan *Ekuitas* masing-masing sebesar Rp145.178.189,00 dan Rp16.493.421.972,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.804.053.742,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp2.427.495.161,00 sehingga terdapat surplus dari kegiatan Operasional senilai Rp376.558.581,00 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-

Operasional dan Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp5.908.000,00 dan sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp382.466.581,00

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp14.573.651.680,00 ditambah surplus-LO sebesar Rp382.466.581,00 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan dikurangi transaksi antar entitas sebesar Rp1.537.303.711,00 sehingga ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp16.493.421.972,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 (Audited) disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan
31 Desember 2024 Dan 31 Desember 2023

Uraian	Catatan	Tahun 2024 (Audited)			31 Desember 2023 (Audited)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi thdp Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	1.725.003.000,00	2.821.130.993,00	163,54	2.747.312.491,00
Jumlah Pendapatan		1.725.003.000,00	2.821.130.993,00	163,54	2.747.312.491,00
BELANJA					
Belanja Operasi	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	0,00	0,00	0	0
Belanja Barang	B.4	2.050.832.000,00	1.855.088.913,00	90,46	1.714.455.733,00
Belanja Bantuan Sosial	B.5	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Operasi		2.050.832.000,00	1.855.088.913,00	90,46	1.714.455.733,00
Belanja Modal					
Belanja Tanah	B.6	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	B.7	554.855.000,00	0,98	0,00	0,00
Belanja Gedung dan Bangunan	B.8	1.699.950.000,00	0,98	0	0,00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	B.9	275.723.000,00	0,00	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	B.10	0,00	0,00	0	0,00
Belanja Modal BLU	B.11	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal		2.530.528.000,00	2.492.933.291,00	98,51	63.127.943,00
Jumlah Belanja		4.581.360.000,00	4.348.022.204,00	94,91	1.777.583.676,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

II. NERACA

Neraca
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	0,00	4.155.084,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	120.649.563,00	205.721.729,00
Kas pada BLU	C.4	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek – BLU	C.5	0,00	0,00
Belanja Dibayar Dimuka	C.6	0,00	0,00
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.7	0,00	0,00
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.8	0,00	0,00
Piutang Bukan Pajak	C.9	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	C.10	0,00	0,00
Bagian Lancar TP/TGR	C.11	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih TP/TGR	C.12	0,00	0,00
Piutang dari kegiatan Operasional BLU	C.13	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.14	0,00	0,00
Persediaan	C.15	34.456.280,00	16.031.288,00
Persediaan Belum diregister	C.16	0,00	0,00
Jumlah Aset Lancar		155.105.843,00	225.908.101,00
Piutang Jangka Panjang			
Tagihan TP/TGR	C.17	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	C.18	0,00	0,00
Jumlah Piutang Jangka Panjang		0,00	0,00
Aset Tetap			
Tanah	C.19	7.669.363.000,00	7.269.363.000,00
Peralatan dan Mesin	C.20	4.145.627.557,00	3.774.601.588,00
Gedung dan Bangunan	C.21	9.029.679.863,00	7.685.947.960,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.22	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	C.23	9.969.500,00	9.969.500,00
KDP	C.24	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	C.25	(4.371.145.602,00)	(3.966.716.966,00)
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.26	0,00	0
Jumlah Aset Tetap		16.483.494.318,00	14.773.165.082,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.27	0,00	0,00
Dana yang dibatasi penggunaannya	C.28	0,00	0,00
Dana Kelolaan Badan Layanan Umum	C.29	0,00	0,00
Dana Jangka Panjang	C.30	0,00	0,00
Aset Lain-lain	C.31	40.808.570,00	285.487.300,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.32	(40.808.570,00)	(285.487.300,00)
Jumlah Aset Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH ASET		16.638.600.161,00	14.999.073.183,00
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.33	131.689.022,00	216.184.503,00
Utang yang belum ditagihkan	C.34	0,00	0,00
Hibah yang Belum Disahkan	C.35	0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.36	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	C.37	13.489.167,00	6.475.000,00
Uang Muka dari KPPN	C.38	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.39	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		145.178.189,00	222.659.503,00
Kewajiban Jangka Panjang			
Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	C.40	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		145.178.189,00	222.659.503,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

Laporan Keuangan KPKNL Kisaran Periode Tahun 2024 (Audited)

EKUITAS			
Ekuitas	C.41	16.493.421.972,00	14.573.651.680,00
JUMLAH EKUITAS		16.493.421.972,00	14.573.651.680,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		16.638.600.161,00	14.796.311.183,00

II. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	2.804.053.742,00	2.641.313.014,00
Jumlah Pendapatan		2.804.053.742,00	2.641.313.014,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	0,00	0,00
Beban Persediaan	D.3	73.873.375,00	67.139.317,00
Beban Barang & Jasa	D.4	907.335.320,00	948.153.176,00
Beban Pemeliharaan	D.5	476.031.318,00	405.062.809,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	380.000.593,00	284.409.375,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	590.254.555,00	541.778.254,00
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	D.8	0,00	0,00
Beban Lain-lain	D.9	0,00	0,00
Jumlah Beban		2.427.495.161,00	2.246.542.931,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		376.558.581,00	394.770.083,00
Kegiatan Non Operasional			
Surplus (Defisit) penjualan aset non-Lancar	D.10	5.908.000,00	100.313.000,00
Surplus (Depisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.11	0,00	0,00
Surplus (Defisit) dari kegiatan non operasional lainnya	D.12	0,00	0,00
Surplus (Defisit) dari kegiatan non operasional		5.908.000,00	100.313.000,00
Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa		382.466.581,00	495.083.083,00
Pos Luar Biasa		0,00	0,00
Pendapatan PNPB		0,00	0,00
Beban Perjalan Dinas		0,00	0,00
Beban Persediaan		0,00	0,00
Surplus/Defisit LO		382.466.581,00	495.083.083,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Ekuitas Awal	E.1	14.573.651.680,00	14.628.537.026,00
Surplus/Defisit LO	E.2	382.466.581,00	495.083.083,00
Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan		0,00	0,00
Dampak Kumulatif Perubahan		0,00	0,00
Kebijakan/Kesalahan Mendasar			
Lain-lain			
Penyesuaian nilai aset	E.3	0,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	E.4	0,00	0,00
Koreksi atas Reklasifikasi	E.5	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset	E.6	0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.7	0,00	0,00
Koreksi Lain-lain	E.8	0,00	0,00
Jumlah Lain-lain		0,00	0,00
Transaksi Antar Entitas	E.9	1.537.303.711,00	(552.412.874,00)
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E.10	1.919.770.292,00	(54.885.346,00)
Ekuitas Akhir		16.493.421.972,00	14.573.651.680,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2018 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup BUN dan Kementerian Negara/Lembaga.
11. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2012 tentang tentang Penatausahaan Hasil Pengurusan Piutang dan Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Informasi Akrual Pada Laporan Keuangan.
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS

KPKNL Kisaran dibentuk dengan tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. KPKNL Kisaran diharapkan dapat memfasilitasi tercapainya tertib administrasi, tertib hukum, tertib fisik dalam pengelolaan kekayaan negara, piutang Negara, dan lelang.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPKNL Kisaran berusaha memberikan pelayanan di bidang pengelolaan dan kekayaan negara, piutang negara dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat sesuai dengan visi KPKNL Kisaran, yaitu ***“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”***.

Pengertian **profesional** dalam visi tersebut bermakna bahwa tugas- tugas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. **Akuntabel** adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. **Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat** adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat.

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 6 (enam) misi yaitu:

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi

pemerintah.

4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
6. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan.

Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Kisaran untuk periode 2019- 2024 adalah terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi stakeholder.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, KPKNL Kisaran telah menentukan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur dan telah ditetapkan secara spesifik serta dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Sesuai dengan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2019-2024, terdapat 7 (tujuh) **sasaran** yang terkait dengan KPKNL Kisaran yaitu :

1. Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal.

Mengkoordinasikan pemberian data dan informasi keberadaan *asset idle* K/L dalam rangka perencanaan pengadaan belanja modal dari K/L.

2. Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang andal dan akuntabel.

Penatausahaan kekayaan negara yang andal dan akuntabel adalah tercatatnya seluruh kekayaan negara/BMN dalam daftar barang baik di K/L sebagai pengguna dan di Kementerian Keuangan c.q. DJKN sebagai pengelola.

3. Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip *the highest and best use*.

Pemanfaatan BMN adalah upaya penggunaan secara maksimal seluruh BMN untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggara negara.

4. Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara.

Pelayanan pengelolaan kekayaan negara meliputi pelayanan permohonan penetapan status, pemanfaatan, penggunaan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik negara.

5. Terwujudnya *database* nilai kekayaan negara yang kredibel.

Mendapatkan, mengumpulkan, dan mengolah data kekayaan negara sehingga menjadi informasi eksekutif yang utuh, tepat waktu, akurat, dan dapat digunakan untuk proses pengambilan keputusan.

6. Tingkat pendapatan yang optimal.

Tingkat pendapatan yang optimal adalah tingkat pencapaian penerimaan dalam negeri yang sesuai dengan target sebagaimana tercantum dalam APBN atau APBN-P.

7. Tingkat kepercayaan *stakeholders* yang tinggi dan citra yang meningkat dengan didukung oleh tingkat pelayanan yang andal .

Tingkat kepercayaan *stakeholders* yang tinggi diukur berdasarkan hasil survei kepuasan *stakeholder* oleh lembaga independen atau internal DJKN. Hasil survei yang positif akan meningkatkan citra DJKN di mata *stakeholder*.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka diperlukan **strategi** yang harus ditempuh oleh KPKNL Kisaran. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Strategi KPKNL Kisaran yang akan ditempuh adalah :

1. Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang.
2. Menatausahakan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang dengan akurat dan akuntabel.
3. Meningkatkan pengamanan kekayaan negara baik secara administrasi, fisik dan tertib hukum.
4. Mengintegrasikan perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) dengan penganggaran.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang.
6. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara termasuk aset idle dan pengurusan piutang negara.

7. Meningkatkan penerimaan kembali (*recovery*) yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBN dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
8. Meningkatkan kesadaran (*awareness*) dan kemitraan dengan *stakeholder* dalam pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang.
9. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang.
10. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Organisasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan Pengelolaan Anggaran.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, KPKNL Kisaran melaksanakan program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh KPKNL Kisaran untuk mendapatkan suatu hasil.

Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Kisaran Tahun 2024

Kode	IKU	Target Q4	Realisasi Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
	Stakeholder Perspective(30%)						24,57%
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan						81,89%
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	52,33%	14%	42%	52,329%	52,33%
1b-CP	Indeks integritas organisasi	89,17	92,44	19%	58%	103,67%	103,67%
	Customer Perspective(20%)						22,51%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa						111,49%
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5%	76,78%	19%	50%	107,38%	107,38%
2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5%	100,00%	19%	50%	115,61%	115,61%
3	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif						106,12%
3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	92,24%	14%	50%	92,24%	92,24%
3b-CP	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100%	257,52%	14%	50%	257,52%	120,00%
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien						120,00%
4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	99,95	14%	100%	133,27%	120,00%
	Internal Process Perspective (25%)						27,85%
5	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif						94,16%
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	68,32%	14%	50%	68,32%	68,32%
5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	127,05%	14%	50%	127,05%	120,00%

Laporan Keuangan KPKNL Kisaran Periode Tahun 2024 (Audited)

6	Penerapan tata Kelola Piutang dan Lelang yang produktif						120,00%
6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	71%	56,52%	14%	50%	120,39%	120,00%
6b-CP	Persentase produktivitas lelang	89%	131,25%	14%	50%	147,47%	120,00%
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional						120,00%
7a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	0,00%	14%	50%	200,00%	120,00%
7b-N	Persentase Capaian Hasil Survei Data Properti	100%	120,00%	14%	50%	120,00%	120,00%
Learning & Growth Perspective (25%)							29,83%
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif						117,25%
8a-CP	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko	85	97,32	14%	50%	114,49%	114,49%
8b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90%	113,63%	14%	50%	126,25%	120,00%
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel						120,00%
9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,0	120,00	14%	33%	120,00%	120,00%
9b-CP	Deviasi data PNPB Fungsional DIKN	10%	0%	14%	33%	200,00%	120,00%
9c-N	Tingkat Penguatan manajemen BMN dan Pengadaan	100%	120%	14%	33%	120,00%	120,00%
10	Komunikasi publik yang efektif						120,00%
10a-CP	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	100,00	14%	100%	125,00%	120,00%
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah						120,00%
11a-CP	Indeks efektivitas UKI	82	99,10	14%	100%	120,85%	120,00%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)							104,75%

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 (Audited) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KPKNL Kisaran. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAKTI terdiri dari beberapa Modul, yaitu Modul Penganggaran, Modul Komitmen, Modul Bendahara, Modul Piutang, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap dan Modul General Ledger Pelaporan (GLP). SAKTI Modul GLP diantaranya dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas, laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Jumlah entitas akuntansi satuan kerja KPKNL Kisaran adalah 1 entitas.

A.4 Basis Akuntansi

Basis
Akuntansi

KPKNL Kisaran menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5 Dasar Pengukuran

Dasar
Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan KPKNL Kisaran dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 (Audited) telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan

pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan KPKNL Kisaran adalah sebagai berikut:

- **Pendapatan – LRA**

Pendapatan
- LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.

Pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

- **Pendapatan-LO**

Pendapatan
- LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebagai berikut:

- Penerimaan Bea Lelang Batal Atas Permintaan Penjual (setoran SSBP menggunakan MAP 425782). Pendapatan diakui pada saat diterimanya surat pemberitahuan pembatalan dari penjual oleh Kepala KPKNL dan disetor ke Rekening Penampungan Lelang KPKNL;
- Penerimaan Uang Jaminan Penawaran Lelang dari Pembeli Wanprestasi (setoran SSBP menggunakan MAP 425782. Pendapatan diakui pada saat telah ditetapkannya Pembeli Lelang wanprestasi oleh Pejabat Lelang;
- Penerimaan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dari Penanggung Hutang (setoran SSBP menggunakan MAP 425785). Pendapatan diakui pada saat telah pastinya pembayaran angsuran atau

penarikan yang dindikasikan oleh telah diterimanya pembayaran oleh Bendahara Penerima atau telah masuk ke dalam rekening Bendahara Penerima dan telah terverifikasi.

- Penyetoran atas Penerimaan Piutang Negara Yang Tidak Jelas (setoran SSBP menggunakan MAP 425999). Pendapatan diakui setelah Proses verifikasi dan konfirmasi dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak penerimaan tersebut masuk ke Rekening Penampungan Piutang dan telah disetorkan ke Kas Negara.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

- **Belanja**

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- **Beban**

Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Kebijakan
Akuntansi
atas Aset

- **Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

- **Aset Lancar**

Aset
Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perhendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,
 - c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Penyisihan Piutang Tidak

Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut :

Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/ DJKN	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam

rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

a. Aset Tetap

Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - (a). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - (b). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - (c). Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang jdih.kemenkeu.go.id - 240 - (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

b. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 Tahun 2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang;
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
 - d. Aset Tetap Renovasi yang tidak menambah masa manfaat.
- Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji dalam tabel berikut.

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

Piutang
Jangka
Panjang

c. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan (TP) adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.
- TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

d. Aset Lainnya

Aset
Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,

- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya

termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten 10 tahun Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga 20 tahun Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni 25 tahun Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. 50 tahun II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

6. Kewajiban

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang

mengikat atau peraturan perundang-undangan.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

B. Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C. Implementasi Sistem Akuntansi Tingkat Instansi (SAKTI)

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berdasarkan Akrua
Pertama Kali*

Mulai tahun 2018 KPKNL Kisaran telah mulai melaksanakan implementasi SAKTI (Sistem Akuntansi Tingkat Instansi) yang mengintegrasikan seluruh aplikasi yang berkaitan dengan laporan keuangan yaitu RKAKL-DIPA, SAS/SPM, Persediaan, SIMAK BMN & SAIBA, yang terdiri dari beberapa modul yaitu modul penganggaran, komitmen, PPSPM, bendahara pengeluaran/penerimaan, piutang, aset tetap, persediaan dan General Ledger Pelaporan (GLP). Untuk KPKNL Kisaran ini pelaksanaan implementasi SAKTI termasuk ke dalam Tahap IIIB yang mana sebelumnya sudah dilakukan implementasi SAKTI pada

internal Ditjen Perbendaharaan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama. Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2017 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pagu belanja
Rp4.581.360.000,00.

Satuan kerja KPKNL Kisaran memperoleh alokasi anggaran Tahun 2024 (Audited) sebesar Rp4.581.360.000,00.

Realisasi Pendapatan
Negara dan Hibah
Rp2.821.130.993,00

B.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.821.130.993,00 atau mencapai 163,54 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.725.003.000,00. Pendapatan Satuan Kerja KPKNL Kisaran terdiri dari pendapatan jasa lainnya, pendapatan, bunga, pengelolaan rekening Perbankan dan iuran badan serta pendapatan denda, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian estimasi dan realisasi PNBPN sampai dengan tanggal pelaporan dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum	-	-	0,00
2	Pendapatan BLU lainnya	-	-	0,00
3	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan	8.908.000	20.338.000	228,31
4	Pendapatan jasa Lainnya	-	1.000.000	0,00
5	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	1.716.095.000	2.677.933.673	156,05
6	Pendapatan Denda	-	8.371.295	0,00
7	Pendapatan lain-lain	-	113.488.025	
	Jumlah	1.725.003.000	2.821.130.993	163,54
	Pengembalian Pendapatan	-	-	0,00
	Jumlah Netto	1.725.003.000	2.821.130.993	163,54

Realisasi PNBPN Tahun 2024 (Audited) mengalami kenaikan sebesar Rp73.818.502,00 atau 2,69% dari realisasi 31 Desember 2023 yaitu Rp2.747.312.491,00. Perbandingan realisasi PNBPN Tahun 2024 (Audited) dan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Laporan Keuangan KPKNL Kisaran Periode Tahun 2024 (Audited)

No.	Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum	-	-	0,00	0,00
2	Pendapatan BLU lainnya	-	-	0,00	0,00
3	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan	20.338.000	108.993.000	-88.655.000,00	-81,34
4	Pendapatan jasa Lainnya	1.000.000	501.989	498.011,00	0,00
5	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	2.677.933.673	2.637.432.487	40.501.186,00	1,54
6	Pendapatan denda	8.371.295	-	8.371.295,00	0,00
7	Pendapatan lain-lain	113.488.025	385.015	113.103.010,00	0,00
	Jumlah	2.821.130.993,00	2.747.312.491,00	73.818.502,00	2,69

B.2. Belanja

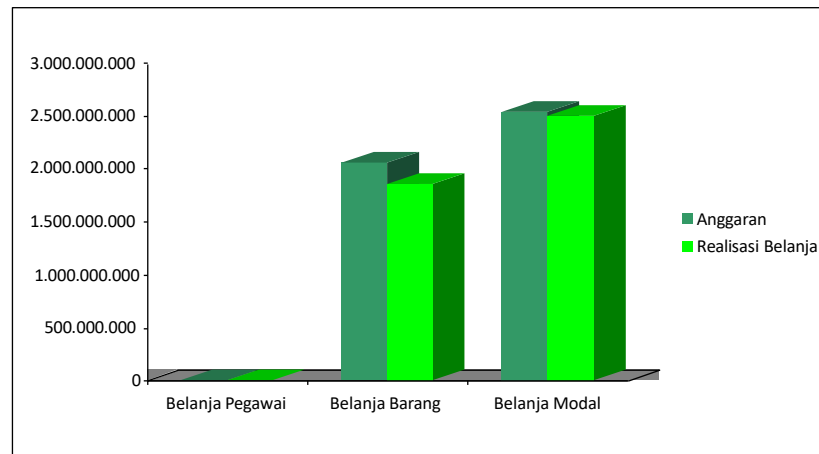
Realisasi Belanja
Negara
Rp4.348.022.204,00

Realisasi belanja *KPKNL Kisaran* pada *Tahun 2024 (Audited)* adalah sebesar Rp4.348.022.204,00 atau sebesar 94,91 persen dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp0,00. Anggaran belanja *KPKNL Kisaran Tahun 2024 (Audited)* adalah sebesar Rp4.581.360.000,00.

Rincian anggaran dan realisasi belanja *Tahun 2024 (Audited)* dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
52	Belanja Barang	2.050.832.000,00	1.855.088.913,00	90,46
53	Belanja Modal	2.530.528.000,00	2.492.933.291,00	98,51
	<i>Total Belanja Kotor</i>	<i>4.581.360.000,00</i>	<i>4.348.022.204,00</i>	<i>94,91</i>
	<i>Pengembalian</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Total Belanja Netto</i>	<i>4.581.360.000,00</i>	<i>4.348.022.204,00</i>	<i>94,91</i>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 (Audited) dapat dilihat pada grafik berikut :



Realisasi belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2.570.438.528,00 dibandingkan periode yang berakhir pada 31 Desember 2023. Kenaikan tersebut dikarenakan beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:

- Belanja Modal Berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp437.357.300,00 berupa pembelian mobil dinas dan kendaraan roda dua;
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.255.694.250,00 berupa pembangunan rumah negara;
- Belanja penambahan nilai gedung dan bangunan sebesar Rp212.520.000,00 berupa renovasi mess pegawai dan perbaikan pada gedung dan bangunan kantor yang menambah nilai gedung dan bangunan.

Realisasi belanja KPKNL Kisaran per kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 (Audited) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi Belanja (Rp)	% Real thd Angg
Rupiah Murni (01)				
4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	18.597.000	17.285.500	92,95
4798	Pengelolaan Aset	185.247.000	149.726.947	80,83
4700	Legislasi dan Litigasi	22.088.000	17.636.000	79,84
4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	4.190.096.000	4.021.741.891	95,98
4702	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	20.000.000	12.992.500	64,96
4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	15.020.000	14.639.530	97,47
PNBP (04)				
4796	Komunikasi, Edukasi dan Standardisasi	4.267.000	4.016.000	94,12
4798	Pengelolaan Aset	126.045.000	109.983.836	87,26
Jumlah		4.581.360.000	4.348.022.204	94,91

Perbandingan realisasi belanja Tahun 2024 (Audited) dan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Naik/(Turun)	
		Tahun 2024 (Audited)	31 Desember 2023	Rp	%
51	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0
52	Belanja Barang	1.855.088.913,00	1.714.455.733,00	140.633.180,00	8,20
53	Belanja Modal	2.492.933.291,00	63.127.943,00	2.429.805.348,00	0
Jumlah		4.348.022.204,00	1.777.583.676,00	2.570.438.528,00	144,60

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp0,00

Belanja Pegawai adalah pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dikerjakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tidak ada realisasi karena mulai 1 Agustus 2020 pembayaran gaji pegawai sudah dipindahkan terpusat di Kantor Pusat DJKN dan terhitung mulai 1 Juli 2022 pembayaran gaji dipusatkan pada satker

Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, sehingga pada satker KPKNL Kisaran tidak ada pagu maupun realisasi pembayaran untuk periode laporan ini.

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp1.855.088.913,00

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.855.088.913,00 dan Rp 1.714.455.733,00. Realisasi belanja barang Tahun 2024 (Audited) mengalami kenaikan sebesar 8,20 persen dari realisasi belanja barang 31 Desember 2023. Kenaikan tersebut disebabkan karena penyebaran pandemic covid 19 di tahun 2022 sudah semakin melandai dan aktifitas perkantoran juga sudah semakin pulih sehingga kebutuhan terhadap sarana dan prasarana penunjang aktifitas perkantoran juga semakin meningkat.

Rincian Belanja Barang **Tahun 2024 (Audited) dan 31 Desember 2023** dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)	Naik/ (Turun)	%
Belanja Barang Operasional	741.373.065	786.524.456	-45.151.391,00	-5,74
Belanja Barang Non Operasional	27.320.000	25.786.184	1.533.816,00	5,95
Belanja Barang Persediaan	92.298.367	77.479.817	14.818.550,00	19,13
Belanja Jasa	138.065.570	135.193.092	2.872.478,00	2,12
Belanja Pemeliharaan	476.031.318	405.062.809	70.968.509,00	17,52
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	380.000.593	284.409.375	95.591.218,00	33,61
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	0,00	0,00
Belanja Barang BLU	-	-	0,00	0,00
Total Belanja Barang Kotor	1.855.088.913	1.714.455.733	140.633.180,00	8,20
Total Pengembalian Belanja Barang	-	-	0,00	0,00
Total Belanja Barang Netto	1.855.088.913,00	1.714.455.733,00	140.633.180,00	8,20

Belanja Modal

Belanja Modal
Rp2.492.933.291,00

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu

satuan kerja bukan untuk dijual.

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.492.933.291,00 dan Rp63.127.943,00. Realisasi belanja modal Tahun 2024 (Audited) mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023, hal ini disebabkan karena tahun 2024 satker KPKNL Kisaran merealisasikan belanja modal berupa pembelian peralatan dan mesin, pembangunan rumah negara, dan renovasi mess pegawai.

Rincian Belanja Modal Tahun 2024 (Audited) dan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)	Naik/ (Turun)	%
Belanja Modal Tanah	-	-	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	546.439.388	63.127.943	483.311.445,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.946.493.903	-	1.946.493.903,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi	-	-	0,00	0,00
Belanja Modal Lainnya	-	-	0,00	0,00
Belanja Modal BLU	-	-	0,00	0,00
Total Belanja Modal Kotor	2.492.933.291	63.127.943	2.429.805.348,00	0,00
Total Pengembalian Belanja Modal	-	-	0,00	0,00
Total Belanja Modal Netto	2.492.933.291,00	63.127.943,00	2.429.805.348,00	0,00

B.6 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah
Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Tanah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2024 (Audited) dan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada table berikut :

URAIAN JENIS BELANJA	Tahun 2023 (Audited)	Tahun 2022 (Audited)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0,00
Belana Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bersih	0	0	0,00

B.7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp546.439.388,-

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp546.439.388 dan Rp63,127,943.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 (Audited) mengalami kenaikan dibandingkan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2023. Kenaikan tersebut disebabkan karena Tahun 2023 satker KPKNL Kisaran merealisasikan Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pembelian Minibus (penumpang 14 orang ke bawah) sebanyak 1 unit senilai Rp326.500.000.
- 2) Pembelian kamera digital sebanyak 1 buah senilai Rp29.159.000.
- 3) Pembelian sound system sebanyak 1 buah senilai Rp19.976.200.
- 4) Pembelian Microphone/Wireless MIC sebanyak 1 buah senilai Rp1.476.100.
- 5) Pembelian sepeda motor sebanyak 2 unit senilai Rp50.930.000.
- 6) Pembelian distance meter sebanyak 2 unit senilai Rp9.316.000.
- 7) Pembelian Tempat Tidur Ukuran 160 x 200 cm senilai Rp20,237,490.
- 8) Pembelian AC 1/2 PK untuk mess pegawai senilai Rp14,228,395.
- 9) Pembelian Meja Makan senilai Rp5,795,100.
- 10) Pembelian Sofa senilai Rp16,570,200.
- 11) Pembelian Lemari Es untuk rumah negara senilai Rp10,313,755.
- 12) Pembelian AC 1/2 PK untuk rumah negara senilai Rp14,795,994.
- 13) Lemari es untuk mess pegawai senilai Rp2,976,252.
- 14) Pembelian kompor gas untuk mess pegawai Rp1,000,000.
- 15) Pembelian infocus senilai Rp6.915.300.
- 16) Pembelian AC 1 PK untuk kantor senilai Rp6.454.502.

Kenaikan Penurunan realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2024 (Audited) dibandingkan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

URAIAN JENIS BELANJA	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)	Naik (Turun) %
Peralatan dan mesin	-	-	0,00
Penambahan nilai peralatan dan mesin	546.439.388	63.127.943	0,00
Jumlah Belanja Kotor	546.439.388	63.127.943	865,61
Pengembalian Belanja Modal	-	-	0,00
Jumlah Belanja Bersih	546.439.388	63.127.943	0,00

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp1.946.493.903,-

B.8 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1,946,493,903,- dan Rp0,-

Perbandingan realiasi belanja modal gedung dan bangunan Tahun 2024 (Audited) dibandingkan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

URAIAN JENIS BELANJA	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)	Naik (Turun) %
Gedung dan Bangunan	1.674.259.000	-	100,00
Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
Upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis	-	-	0,00
Perjalanan gedung dan bangunan	-	-	0,00
Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	272.234.903	-	100,00
Jumlah Belanja Kotor	1.946.493.903	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	-	0,00
Jumlah Belanja Bersih	1.946.493.903	0	0,00

Belanja Modal Jalan,
Irigasi dan Jaringan
Rp0,00

B.9 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Perbandingan realiasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2024 (Audited) dibandingkan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada table berikut :

URAIAN JENIS BELANJA	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)	Naik (Turun) %
- Irigasi	0	0	0,00
- Jaringan	0	0	0,00
- Penambahan nilai jaringan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bersih	0	0	0,00

Belanja Modal
Lainnya Rp0,00

B.10 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Perbandingan realiasi belanja modal lainnya Tahun 2024 (Audited)

dibandingkan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

URAIAN JENIS BELANJA	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)	Naik (Turun) %
Modal lainnya	0	0	0,00
Penambahan nilai aset tetap lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	-	0,00
Jumlah Belanja Bersih	0	0	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

Aset Lancar

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Nilai Aset Lancar KPKNL Kisaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp155.105.843,00 dan Rp225.908.101,00.

Rincian Aset Lancar pada KPKNL Kisaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	4.155.084,00	(4.155.084,00)
3	Kas Lainnya dan Setara Kas	120.649.563,00	205.721.729,00	(85.072.166,00)
6	Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	0,00	0,00	0,00
7	Uang Muka Belanja (Prepayment)	0,00	0,00	0,00
8	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0,00	0,00	0,00
9	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	,00	0,00	0,00
10	Persediaan	34.456.280,00	16.031.288,00	18.424.992,00
11	Persediaan yang belum deregister	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	155.105.843,00	225.908.101,00	(70.802.258,00)

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan atau Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari dana kas kecil (UP/TUP) yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran KPKNL Kisaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023
Saldo Rekening	-	-
Uang Tunai	-	-
Kuitansi belum dipertanggungjawabkan	-	-
	-	-

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran atau saldo UP/TUP Tahun 2024 (Audited) masih dipergunakan sebagai uang persediaan untuk pelaksanaan operasional rutin perkantoran KPKNL Kisaran.

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara
Penerimaan Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp4.155.084,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak .

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Keterangan	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023
Uang yang belum menjadi hak negara	-	4.155.084
	-	4.155.084

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp120.649.563,00

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan dana selain Uang Persediaan (UP/TUP) yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran di lingkungan KPKNL Kisaran berupa dana pihak ketiga yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan/Pengeluaran serta pajak - pajak yang sudah dipungut oleh bendahara penerimaan/pengeluaran namun belum disetorkan ke kas Negara serta kas lainnya di BLU.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp120.649.563,00 dan Rp205.721.729,00 yang merupakan kas berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran maupun bendahara penerimaan yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Keterangan	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	120.649.563,00	205.721.729
	120.649.563,00	205.721.729

C.4 Pendapatan yang masih Harus Diterima

Pendapatan yang
Masih Harus Diterima
Rp0,00

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya.

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Jenis	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023
Pendapatan Bea Lelang PL I	-	-

Tidak terdapat saldo pendapatan yang masih harus diterima oleh KPKNL Kisaran pada akhir tahun 2024 dan akhir tahun 2023.

C.5. Persediaan

Persediaan
Rp34.456.280,00

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing

adalah sebesar Rp34.456.280,00 dan Rp16.031.288,00, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Barang Konsumsi	34.456.280,00	16.031.288,00
Bahan untuk Pemeliharaan	0,00	0,00
Suku Cadang	0,00	0,00
Pita Cukai Materai dan Leges	0,00	0,00
ATL untuk diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00
Bahan Baku	0,00	0,00
Persediaan Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	34.456.280,00	16.031.288,00

Keterangan :

- Persediaan senilai Rp0,00 dalam kondisi rusak;
- Persediaan senilai Rp0,00 dalam kondisi usang.

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap

Saldo aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji sebesar Rp16.483.494.318,00 dan Rp14.570.403.082,00.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset tetap pada KPKNL Kisaran berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
1	Tanah	7.669.363.000,00	7.269.363.000,00
2	Peralatan dan Mesin	4.145.627.557,00	3.774.601.588,00
3	Gedung dan Bangunan	9.029.679.863,00	7.685.947.960,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	9.969.500,00	9.969.500,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
7	Aset Tetap yang Belum Diregister	0,00	0
Jumlah Aset Tetap		20.854.639.920,00	18.739.882.048,00
Akumulasi Penyusutan		(4.371.145.602,00)	(4.169.478.966,00)
Nilai Buku Aset Tetap		16.483.494.318,00	14.570.403.082,00

C.6 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki KPKNL Kisaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp7.669.363.000,00 dan Rp7.269.363.000,00.

Tanah

Rp7.669.363.000,00

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2023	7.269.363.000
Mutasi Tambah :	
100 Koreksi Saldo awal	0,
101 Pembelian	400.000.000,
102 Transfer Masuk	0,
103 Hibah masuk	-
105 Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	-
Penyelesaian pembangunan langsung	-
107 Reklasifikasi Masuk	0,
112 Perolehan Lainnya	-
177 Reklas dari aset lainnya ke aset tetap	-
Perolehan Reklas dari intra ke ekstra/sebalik	-
202 Pengembangan Nilai Aset	0,
204 Koreksi Pencatatan nilai/kuantitas	0,
208 Pengembangan melalui KDP	0,
Perolehan lainnya	-
Koreksi Pencatatan nilai/kuantitas (+)	-
Mutasi Kurang :	
302 Transfer keluar	0,
Saldo per 31 Desember 2024 (Audited)	7.669.363.000

terdapat mutasi tambah pada aset berupa tanah sebesar Rp400.000.000,- dengan luas 542 m2 yang berada di Jl. Mawar Lingkungan V, Kel/Desa Kisaran Naga, Kec. Kota Kisaran Timur, Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara.

Rincian tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Alamat lokasi Tanah	Luas (m2)
1	Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 47, Kel. Kisaran Naga	2.368
2	Jalan Sei Silau, Kel. Tebing Tinggi Kisaran	180
3	Jalan Mawar Lingkungan V, Kel. Kisaran Naga	542
	Total luas tanah	3.090

Pada tanggal pelaporan semua tanah tersebut dikuasai dan digunakan oleh KPKNL Kisaran.

C.7 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin KPKNL Kisaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah Rp4.145.627.557,00 dan Rp3.774.601.588,00.

Peralatan dan Mesin

Rp4.145.627.557,00

Rincian mutasi nilai aset peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	3.774.601.588
Mutasi Tambah :	
100 Koreksi Saldo awal	-
101 Pembelian	546.439.388
102 Transfer Masuk	11.900.000
103 Hibah masuk	-
105 Penyelesaian Pembangunan dengan kdp	-
106 Pembatalan Penghapusan	-
107 Reklasifikasi Masuk	-
112 Perolehan Lainnya	-
115 Input perolehan BMN oleh Tim Pengemb	-
177 Reklas dari aset lainnya ke aset tetap	-
Perolehan Reklas dari intra ke ekstra/sebalik	-
202 Pengembangan Nilai Aset	-
204 Koreksi Pencatatan	-
208 Pengembangan melalui KDP	-
402 Penggunaan kembali BMN yang sudah di	-
Mutasi Kurang :	
204 Koreksi Pencatatan Nilai/uantitas	-
301 Penghapusan	(187.313.419)
302 Transfer keluar	-
304 Reklasifikasi keluar	-
305 Koreksi Pencatatan	-
401 Penghentian aset dari penggunaan	-
911 Pencatatan barang yang mau dihapuskan	-
Belum teridentifikasi	-
Saldo per 31 Desember 2023	4.145.627.557

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2023. Kenaikan tersebut disebabkan karena Tahun 2024 satker KPKNL Kisaran merealisasikan Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:

- 17) Pembelian Minibus (penumpang 14 orang ke bawah) sebanyak 1 unit senilai Rp326.500.000.
- 18) Pembelian kamera digital sebanyak 1 buah senilai Rp29.159.000.
- 19) Pembelian sound system sebanyak 1 buah senilai Rp19.976.200.
- 20) Pembelian Microphone/Wireless MIC sebanyak 1 buah senilai Rp1.476.100.
- 21) Pembelian sepeda motor sebanyak 2 unit senilai Rp50.930.000.
- 22) Pembelian distance meter sebanyak 2 unit senilai Rp9.316.000.
- 23) Pembelian Tempat Tidur Ukuran 160 x 200 cm senilai Rp20,237,490.
- 24) Pembelian AC 1/2 PK untuk mess pegawai senilai Rp14,228,395.

- 25) Pembelian Meja Makan senilai Rp5,795,100.
- 26) Pembelian Sofa senilai Rp16,570,200.
- 27) Pembelian Lemari Es untuk rumah negara senilai Rp10,313,755.
- 28) Pembelian AC 1/2 PK untuk rumah negara senilai Rp14,795,994.
- 29) Lemari es untuk mess pegawai senilai Rp2,976,252.
- 30) Pembelian kompor gas untuk mess pegawai Rp1,000,000.
- 31) Pembelian infocus senilai Rp6.915.300.
- 32) Pembelian AC 1 PK untuk kantor senilai Rp6.454.502.

C.8 Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan Rp
9.029.679.863,00

Nilai Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp9.029.679.863,00 dan Rp7.685.947.960,00.

Rincian mutasi gedung dan bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	7.685.947.960
Mutasi Tambah :	
100 Koreksi Saldo awal	-
101 Pembelian	-
102 Transfer masuk	-
103 Hibah masuk	-
107 Reklasifikasi Masuk	-
112 Perolehan Lainnya	-
113 Penyelesaian pembangunan langsung	-
177 Reklasifikasi dari aset lainnya ke aset	-
202 Pengembangan Nilai Aset	-
204 Koreksi Pencatatan	(202.762.000)
208 Pengembangan melalui KDP	1.546.493.903
209 Transaksi Normalisasi	-
258 Koreksi saldo awal migrasi barang	-
334 Koreksi ekuitas akibat koreksi revaluasi	-
Pengembangan Nilai Aset	-
Koreksi RM akibat koreksi penilaian kembali	-
Koreksi Saldo Awal Migrasi Barang tdk	-
Koreksi beban kerugian penghapusan akibat	-
Saldo per 31 Desember 2024 (Audited)	9.029.679.863

Sampai dengan Tahun 2024 (Audited) terdapat realisasi belanja modal gedung dan bangunan yaitu pembangunan lima rumah negara golongan II Tipe D sebesar Rp1.546.493.903,00 dan renovasi rumah negara golongan II berbentuk mess dengan nilai sebesar Rp272.234.903,00.

C.9 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
Rp9.969.500,00

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp9.969.500,00 dan Rp9.969.500,00. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Nilai buku Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp9.969.500,00 yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Rincian mutasi aset tetap lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023 (Audited)	9.969.500
Mutasi Tambah :	
102 Transfer Masuk	-
Mutasi Kurang :	
401 Penghentian aset dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2024 (Audited)	9.969.500

Tidak terdapat mutasi tambah/kurang pada aset berupa aset tetap lainnya.

Sampai dengan Tahun 2024 (Audited) tidak ada realisasi belanja modal lainnya dan mutasi aset yang berasal dari pembelian/pengembangan langsung.

C.10 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp(4.371.145.602,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp(4.371.145.602,00) dan Rp(4.169.478.966,00).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Berikut disajikan rincian akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	7.669.363.000,00	0	7.669.363.000,00
2	Peralatan & Mesin	4.145.627.557,00	(3.173.371.967,00)	972.255.590,00
3	Gedung & Bangunan	9.029.679.863,00	(1.197.773.635,00)	5.826.455.375,00
4	Aset Tetap Lainnya	9.969.500,00	0,00	9.969.500,00
5	Aset Tetap yang belum Diregister	0,00	0	0,00
	Jumlah	46.329.962.167,00	(4.371.145.602,00)	16.483.494.318,00

Kewajiban Jangka Pendek
Rp145.178.189,00

Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan membayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Nilai Kewajiban Jangka Pendek KPKNL Kisaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp145.178.189,00 dan Rp222.659.503,00, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Kewajiban Jangka Pendek	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
1	Utang kepada Pihak Ketiga	131.689.022,00	216.184.503,00
2	Utang yang Belum Ditagihkan	0,00	0,00
3	Hibah yang belum disahkan	0,00	0,00
4	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	0,00	0,00
5	Pendapatan Diterima Dimuka	13.489.167,00	6.475.000,00
6	Uang Muka dari KPPN	0,00	0,00
7	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	4.675.025,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	145.178.189,00	222.659.503,00

C.11. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga
Rp131.689.022,00

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp131.689.022,00 dan Rp216.184.503,00.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Adapun Rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada KPKNL Kisaran per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai
1	Belanja Pegawai yang belum dibayar	-
2	Belanja Barang yang belum dibayar	11.039.459
3	Belanja Modal yang belum dibayar	-
4	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	-
5	Pegeluaran Transito yang masih harus dibayar	-
6	Utang kepada Pihak ketiga lainnya	-
7	Dana Pihak ketiga	120.649.562,54
8	Dana Pihak ketiga Lainnya - BLU	-
	Jumlah	131.689.021,54

Belanja barang yang belum dibayar merupakan tagihan rutin operasional kantor berupa tagihan Listrik Rp9.625.941 , tagihan telepon Rp1.125.318, tagihan pos

Rp168.200, dan tagihan langganan koran Rp120.000.

Dana pihak ketiga merupakan dana yang terdapat di rekening bendahara penerimaan yaitu Uang Jaminan Lelang yang Belum Diambil Rp112.707.000 dan Lain-Lain Piutang Rp7.942.548,54.

Pendapatan Diterima
di Muka
Rp13.489.167,00

C.12. Pendapatan Diterima di Muka

Jumlah Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp13.489.167,- dan Rp6.475.000,- Rincian saldo pendapatan diterima di muka per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan tanah untuk pembangunan galery UMKM dengan nomor dokumen kontrak PJ-02/KNL.0203/2023 untuk periode kontrak mulai tanggal 24/08/2023 s.d. 23/08/2026 (36 bulan) dengan nilai kontrak Rp6.600.000, sehingga nilai pendapatan diterima di muka per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.666.667.
- 2) Pemanfaatan tanah untuk cafe K&L dengan nomor dokumen kontrak PJ-02/WKN.02/KNL.0203/2022 untuk periode kontrak mulai tanggal 21/01/2024 s.d. 20/01/2025 (12 bulan) dengan nilai kontrak Rp1.500.000, sehingga nilai pendapatan diterima di muka per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp125.000.
- 3) Pemanfaatan tanah untuk anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BRI dengan dokumen kontrak PJ-01/KNL.0203/2024 untuk periode kontrak mulai tanggal 01/04/2024 s.d. 30/04/2027 (36 bulan) dengan nilai kontrak Rp12.930.000, sehingga nilai pendapatan diterima di muka per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp9.697.500.

Uang Muka dari
KPPN Rp0,00

C.38. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Uang muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.39. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek

Nilai utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember

Ekuitas

Rp16.493.421.972,00

C.41. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp16.493.421.972,00 dan Rp14.573.651.680,00.

Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**Surplus (Defisit) Laporan Operasional**

Merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa. Surplus/defisit untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp382.466.581,00 dan surplus Rp4.786.837.502,00.

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB

Rp2.804.053.742,00

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.804.053.742,00 dan Rp2.641.313.014,00. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)	Naik (Turun) %
Pendapatan Penjualan Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha	2.804.053.742	2.641.313.014	6
	2.804.053.742	2.641.313.014	6

D.2 Beban Pegawai

Beban

Rp0,00

Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2024 (Audited) dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Mulai 1 Agustus 2020 pembayaran gaji pegawai KPKNL Kisaran sudah dipindahkan terpusat di Kantor Pusat DJKN dan terhitung mulai 1 Juli 2022 pembayaran gaji dipusatkan pada satker Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, sehingga pada satker KPKNL Kisaran tidak ada pagu maupun realisasi pembayaran untuk periode laporan ini sehingga pada laporan keuangan ini tidak terdapat beban belanja pegawai.

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp73.873.375,00

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2024 (Audited) dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp73.873.375,00 dan Rp67.139.317,00.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi/pemakaian atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 (Audited) dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	738.873.375	67.139.317	1.000,51
Jumlah	738.873.375	67.139.317	1.000,51

D.4 Beban Barang & Jasa

Beban Barang & Jasa
Rp907.335.320,00

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada Tahun 2024 (Audited) dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp907.335.320,00 dan Rp948.153.176,00.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/ atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2024 (Audited) dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Uraian Jenis Beban	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)	Naik (Turun) %
Beban keperluan perkantoran	606.411.565	549.734.933	10,31
Beban pengiriman surat dinas pos pusat	7.214.600	9.054.400	(20,32)
Beban honor operasional satuan kerja	109.530.000	146.490.000	(25,23)
Beban barang operasional lainnya	3.645.000	63.340.263	(94,25)
Beban bahan	23.675.000	22.146.184	6,90
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	17.986.600	18.183.360	-
Beban Langganan Listrik	125.258.094	121.930.015	2,73
Beban langganan telepon	13.494.461	13.514.021	(0,14)
Beban jasa lainnya	120.000	120.000	-
Beban Barang non operasional Lainnya	-	3.640.000	-
Jumlah	907.335.320	948.153.176	(4,30)

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan
Rp476.031.318,00

Beban Pemeliharaan pada Tahun 2024 (Audited) dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp476.031.318,00 dan Rp405.062.809,00.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2024 (Audited) dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	285.508.597	284.072.982	0,51
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	190.522.721	120.989.827	57,47
Jumlah	476.031.318	405.062.809	17,52

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan
Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2024 (Audited) dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp380.000.593,00 dan

Rp284.409.375,00.

Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 (Audited) dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	369.250.593	266.609.375	38,50
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.750.000	17.800.000	(39,61)
Jumlah	380.000.593	284.409.375	33,61

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan
 dan Amortisasi
 Rp590.254.555,00

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 (Audited) dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp590.254.555,00 dan Rp541.778.254,00.

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 (Audited) dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	398.414.557	369.486.719	7,83
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	191.839.998	172.291.535	11,35
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-
Jumlah Penyusutan	590.254.555	541.778.254	8,95
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Amortisasi Aset Lain-lain	-	-	-
Beban penyusutan aset kelolaan BUN	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	590.254.555	541.778.254	8,95

D.10 Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional Rp0,00

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa
Rp0,00

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2024 (Audited) dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

URAIAN	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)	Naik (Turun) %
Pendapatan PNB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah. Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp16.493.421.972,00 dan Rp14.573.651.680,00, terdiri dari :

Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)	Naik (Turun) %
Ekuitas awal	14.573.651.680	14.628.537.026	(0,38)
Surplus (Defisit) LO	382.466.581	495.083.083	(22,75)
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas	-	2.444.445	-
Lain-lain	-	2.444.445	-
Transaksi antar entitas	1.537.303.711	(552.412.874)	(378,29)
Kenaikan/Penurunan ekuitas	1.919.770.292	(54.885.346)	(3.597,78)
Ekuitas akhir	16.493.421.972	14.573.651.680	13,17

Ekuitas Awal
Rp14.573.651.680,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 dan 1 Januari 2023 adalah masing-masing sebesar Rp14.573.651.680,00 dan Rp14.628.537.026,00

Defisit LO
Rp382.466.581,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus/defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar surplus Rp382.466.581,00 dan surplus Rp495.083.083,00.

Surplus/Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan keladian luar biasa.

Transaksi antar entitas
Rp1.537.303.711,00

E.3 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp1.573.303.711,00 dan Rp(552.412.874,00).

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

Uraian	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	4.348.022.204
Diterima dari Entitas Lain	-2.821.130.993
Transfer Keluar	0
Transfer Masuk	10.412.500
Transaksi Pengelolaan Investasi BA BUN pada BLU	0
Jumlah	1.537.303.711

- Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)
Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar (Rp2.821.130.993,00) sedangkan DKEL sebesar Rp4.348.022.204,00.
- Transfer Masuk/Transfer Keluar
Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp10.412.500,00.

Kenaikan/penurunan
Ekuitas
Rp1.919.770.292,00

E.10 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Kenaikan/penurunan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.919.770.292 dan Rp(54.885.346,00).

Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Surplus/Defisit LO	382.466.581	495.083.083
Koreksi Nilai aset Non Revaluasi	0	0
Koreksi Nilai aset Non Revaluasi	0	0
Koreksi lainnya	0	0
Transaksi antar entitas	1.537.303.711	- 552.412.874
Jumlah	1.919.770.292	-57.329.791

Ekuitas Akhir
Rp16.493.421.972,00

Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp16.493.421.972,00 dan Rp14.573.651.680,00

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. REKENING PEMERINTAH

Daftar informasi rekening pemerintah disajikan sebagaimana dalam lampiran.

F.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

➤ Capaian Kinerja/Output

Capaian kinerja/output 31 Desember 2024 tercapai 95,10 persen.

Capaian kinerja/output tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Uraian Output	Belanja		
	Pagu	Ralisasi	%
Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	9.299.000	8.184.000	88,01
Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	9.298.000	9.101.500	97,89
Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	4.267.000	4.016.000	94,12
Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	35.014.000	30.247.679	86,39
Keputusan Hasil Pengurusan/ Pengelolaan Piutang Negara	22.776.000	22.756.476	99,91
Risalah Lelang	26.045.000	23.981.000	92,08
Risalah Lelang sukarela UMKM (PU)	40.000.000	35.599.900	89,00
Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	19.379.000	16.865.000	87,03
Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	19.796.000	19.740.000	99,72
Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	20.030.000	19.714.074	98,42
Rekomendasi Hasil Penilaian	19.038.000	5.519.800	28,99
Penggalan Potensi Lelang	60.000.000	50.402.936	84,00
Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)	20.954.000	20.549.641	98,07
Pengelolaan Aset BUN	14.128.000	14.034.277	99,34
Aset Eks BLBI yang Dilakukan Penanganan, Penyelesaian, dan Pemulihan Hak Tagih Negara (PN)	4.820.000	300.000	6,22
Layanan Bantuan Hukum	22.088.000	17.636.000	79,84
Kerumahtanggaan	81.140.000	81.040.280	99,88
Layanan Perkantoran	1.578.428.000	1.447.768.320	91,72
Peralatan Fasilitas Perkantoran	175.215.000	169.009.388	96,46
Kendaraan Bermotor	379.640.000	377.430.000	99,42
Gedung/Bangunan	1.975.673.000	1.946.493.903	98,52
Pembinaan/Edukasi Publik	5.000.000	4.569.900	91,40
Kehumasan	10.000.000	5.223.100	52,23
Pameran/Eksibisi	5.000.000	390.000	7,80
Rekomendasi Kepatuhan Internal	15.020.000	14.639.530	97,47
Jumlah	4.572.048.000	4.345.212.704	95,04

➤ Nilai IKPA, SMART DJA dan PKPA

Nilai capaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) cukup baik yaitu 98,35%, nilai capaian SMART DJA dan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA) masing-masing mencapai 100% dan 99,18%.

Nilai capaian IKPA, SMART DJA dan PKPA dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Nilai	Bobot	Nilai Akhir
A. Nilai IKPA (Bobot 50%)				98,35
1	Revisi DIPA	100	10	10,00
2	Deviasi Halaman III DIPA	100	15	15,00
3	Penyerapan Anggaran	98,54	20	19,71
4	Belanja Kontraktual	86,67	10	8,67
5	Penyelesaian Tagihan	100	10	10,00
6	Pengelolaan UP dan TUP	99,75	10	9,75
7	Dispensasi SPM	0	0	-
8	Capaian Output	100	25	25,00
B. Nilai Smart (Bobot 50%)				100,00
1	Capaian RO	100	75%	75,00
2	Penggunaan SBK	100	10%	10,00
3	Efisiensi SBK	100	15%	15,00
Nilai Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran s.d. Triwulan IV				99,18
Realisasi IKU IKKPA Triwulan IV				120%

LAMPIRAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09

Tgl Data : 15/02/25 10:57 AM

SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN 506081

Tgl Cetak : 19/02/25 2:29 PM
Halaman : 1

lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,725,003,000	2,821,130,993	1,096,127,993	164	1,540,241,000	2,747,312,491	(1,207,071,491)	178
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,725,003,000	2,821,130,993	1,096,127,993	164	1,540,241,000	2,747,312,491	(1,207,071,491)	178
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	1,725,003,000	2,821,130,993	1,096,127,993	164	1,540,241,000	2,747,312,491	(1,207,071,491)	178
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	4,581,360,000	4,348,022,204	(233,337,796)	95	1,906,674,000	1,777,583,676	129,090,324	93
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	2,050,832,000	1,855,088,913	(195,743,087)	90	1,843,496,000	1,714,455,733	129,040,267	93
3. Belanja Modal	2,530,528,000	2,492,933,291	(37,594,709)	99	63,178,000	63,127,943	50,057	100
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0
--------------------	---	---	---	---	---	---	---

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09

Tgl Data : 15/02/25 10:57 AM

SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN 506081

Tgl Cetak : 19/02/25 2:29 PM
Halaman : 2

lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	4,581,360,000	4,348,022,204	(233,337,796)	95	1,906,674,000	1,777,583,676	129,090,324	93
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

Kisaran, 19 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
null

MELLY MAIESTA
NIP 197605311999032001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (506081) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG KISARAN

Tgl Data : 19/02/25 12:28 PM
Tgl Cetak : 19/02/25 2:29 PM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Penerimaan	0	4,155,084	(4,155,084)	(100.00)
Kas Lainnya dan Setara Kas	120,649,563	205,721,729	(85,072,166)	(41.35)
Persediaan	34,456,280	16,031,288	18,424,992	114.93
JUMLAH ASET LANCAR	155,105,843	225,908,101	(70,802,258)	(31.34)
ASET TETAP				
Tanah	7,669,363,000	7,269,363,000	400,000,000	5.50
Peralatan dan Mesin	4,145,627,557	3,774,601,588	371,025,969	9.83
Gedung dan Bangunan	9,029,679,863	7,685,947,960	1,343,731,903	17.48
Aset Tetap Lainnya	9,969,500	9,969,500	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(4,371,145,602)	(4,169,478,966)	(201,666,636)	4.84
JUMLAH ASET TETAP	16,483,494,318	14,570,403,082	1,913,091,236	13.13
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	40,808,570	285,487,300	(244,678,730)	(85.71)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(40,808,570)	(285,487,300)	244,678,730	(85.71)
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	16,638,600,161	14,796,311,183	1,842,288,978	12.45
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	131,689,022	216,184,503	(84,495,481)	(39.08)
Pendapatan Diterima Dimuka	13,489,167	6,475,000	7,014,167	108.33
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	145,178,189	222,659,503	(77,481,314)	(34.80)
JUMLAH KEWAJIBAN	145,178,189	222,659,503	(77,481,314)	(34.80)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	16,493,421,972	14,573,651,680	1,919,770,292	13.17
JUMLAH EKUITAS	16,493,421,972	14,573,651,680	1,919,770,292	13.17
JUMLAH EKUITAS	16,493,421,972	14,573,651,680	1,919,770,292	13.17
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	16,638,600,161	14,796,311,183	1,842,288,978	12.45

Keterangan :

FINAL

Kisaran, 19 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
null

MELLY MAIESTA
NIP 197605311999032001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (506081) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG KISARAN

Tgl Data : 15/02/25 10:57 AM

Tgl Cetak : 19/02/25 2:29 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	120,649,563	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	34,456,280	0
0.0	131111	Tanah	7,669,363,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,145,627,557	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	9,029,679,863	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	9,969,500	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,173,371,967
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,197,773,635
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	40,808,570	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	40,808,570
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	11,039,459
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	120,649,563
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	13,489,167
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	4,348,022,204
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	2,821,130,993	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	10,412,500
0.0	391111	Ekuitas	0	14,573,651,680
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	1,289,000
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	4,619,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	7,415,833
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	1,000,000
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	1,765,391,068
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	907,216,586
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	1,170,935
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	8,371,295
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	113,488,025
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	606,411,565	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	17,986,600	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7,214,600	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	109,530,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	23,675,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	3,645,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	125,258,094	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	13,494,461	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	120,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	285,508,597	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	190,522,721	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	369,250,593	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (506081) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG KISARAN

Tgl Data : 15/02/25 10:57 AM
Tgl Cetak : 19/02/25 2:29 PM
Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,750,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	398,414,557	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	191,839,998	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	73,873,375	0
JUMLAH			26,299,180,487	26,299,180,487

Keterangan :
FINAL

Kisaran, 19 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
null

MELLY MAIESTA
NIP 197605311999032001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (506081) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG KISARAN

Tgl Data : 19/02/25 12:28 PM
Tgl Cetak : 19/02/25 2:30 PM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	4,348,022,204
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	2,821,130,993	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	1,289,000
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	4,619,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	14,430,000
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	1,000,000
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	1,769,546,152
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	907,216,586
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	1,170,935
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	8,371,295
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	113,488,025
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	606,531,565	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	17,986,600	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7,324,900	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	109,530,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	23,675,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,645,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	92,298,367	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	124,574,883	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	13,490,687	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	285,508,597	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	190,522,721	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	369,250,593	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,750,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	546,439,388	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,674,259,000	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	272,234,903	0
JUMLAH			7,169,153,197	7,169,153,197

Keterangan :
FINAL

Kisaran, 19 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
null

MELLY MAIESTA
197605311999032001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (506081) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG KISARAN

Tgl Data : 15/02/25 10:57 AM

Tgl Cetak : 19/02/25 2:29 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	2,804,053,742	2,641,313,014	162,740,728	6.161
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	2,804,053,742	2,641,313,014	162,740,728	6.161
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	2,804,053,742	2,641,313,014	162,740,728	6.161
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	73,873,375	67,139,317	6,734,058	10.03
Beban Barang dan Jasa	907,335,320	948,153,176	(40,817,856)	(4.305)
Beban Pemeliharaan	476,031,318	405,062,809	70,968,509	17.52
Beban Perjalanan Dinas	380,000,593	284,409,375	95,591,218	33.61

LAPORAN OPERASIONAL

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	
---	---	---	---	--

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (506081) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG KISARAN

Tgl Data : 15/02/25 10:57 AM

Tgl Cetak : 19/02/25 2:29 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	590,254,555	541,778,254	48,476,301	8.948
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	2,427,495,161	2,246,542,931	180,952,230	8.055
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	376,558,581	394,770,083	(18,211,502)	(4.613)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	5,908,000	100,313,000	(94,405,000)	(94.11)
Pendapatan Pelepasan Aset	5,908,000	100,313,000	(94,405,000)	(94.11)
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5,908,000	100,313,000	(94,405,000)	(94.11)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	382,466,581	495,083,083	(112,616,502)	(22.747)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	382,466,581	495,083,083	(112,616,502)	(22.747)

Keterangan :
FINAL

Kisaran, 19 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
null

MELLY MAIESTA
NIP 197605311999032001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (506081) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG KISARAN

Tgl Data : 19/02/25 12:28 PM
Tgl Cetak : 19/02/25 2:29 PM
Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	14,573,651,680	14,628,537,026	(54,885,346)	(0.38)
SURPLUS/DEFISIT-LO	382,466,581	495,083,083	(112,616,502)	(22.75)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	2,444,445	(2,444,445)	(100)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	2,444,445	(2,444,445)	(100)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	1,537,303,711	(552,412,874)	2,089,716,585	(378.29)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	1,919,770,292	(54,885,346)	1,974,655,638	(3,597.78)
EKUITAS AKHIR	16,493,421,972	14,573,651,680	1,919,770,292	13.17

Keterangan :

FINAL

Kisaran, 19 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
null

MELLY MAIESTA
NIP 197605311999032001

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
UNIT ORGANISASI : 09
WILAYAH/PROVINSI : 0700
SATUAN KERJA : 506081

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN

Tgl. Cetak 19/02/2025 2:31 PM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	4,155,084	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	205,721,729	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	16,031,288	0
0.0	131111	Tanah	7,269,363,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,774,601,588	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	7,685,947,960	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	9,969,500	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,960,783,329
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,208,695,637
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	285,487,300	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	285,487,300
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	10,462,774
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	205,721,729
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	6,475,000
0.0	391111	Ekuitas	0	14,573,651,680
JUMLAH			19,251,277,449	19,251,277,449

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 002
SATUAN KERJA : 506081

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 19/02/25 2:31 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc

JENIS SATUAN KERJA : KD

Tgl Data : 15/2/25 3:53 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	614,692,000	614,692,000	606,531,565	0	606,531,565	98.67	8,160,435
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	18,240,000	18,240,000	17,986,600	0	17,986,600	98.61	253,400
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9,600,000	9,600,000	7,324,900	0	7,324,900	76.3	2,275,100
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	117,456,000	120,426,000	109,530,000	0	109,530,000	90.95	10,896,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	4,800,000	4,800,000	0	0	0	0	4,800,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	764,788,000	767,758,000	741,373,065	0	741,373,065	96.56	26,384,935
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	49,717,000	37,759,000	23,675,000	0	23,675,000	62.7	14,084,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	10,200,000	6,600,000	3,645,000	0	3,645,000	55.23	2,955,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	59,917,000	44,359,000	27,320,000	0	27,320,000	61.59	17,039,000
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	98,300,000	95,330,000	92,298,367	0	92,298,367	96.82	3,031,633
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	98,300,000	95,330,000	92,298,367	0	92,298,367	96.82	3,031,633
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	138,000,000	138,000,000	124,574,883	0	124,574,883	90.27	13,425,117
522112	Belanja Langganan Telepon	16,800,000	16,800,000	13,490,687	0	13,490,687	80.3	3,309,313
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	154,800,000	154,800,000	138,065,570	0	138,065,570	89.19	16,734,430
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	280,178,000	290,265,000	285,508,597	0	285,508,597	98.36	4,756,403
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	280,362,000	270,275,000	190,522,721	0	190,522,721	70.49	79,752,279
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	560,540,000	560,540,000	476,031,318	0	476,031,318	84.92	84,508,682
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	363,263,000	395,231,000	369,250,593	0	369,250,593	93.43	25,980,407
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	38,704,000	32,814,000	10,750,000	0	10,750,000	32.76	22,064,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	401,967,000	428,045,000	380,000,593	0	380,000,593	88.78	48,044,407
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,040,312,000	2,050,832,000	1,855,088,913	0	1,855,088,913	90.46	195,743,087
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	439,855,000	554,855,000	546,439,388	0	546,439,388	98.48	8,415,612
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	439,855,000	554,855,000	546,439,388	0	546,439,388	98.48	8,415,612

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA

: 015
: 09
: 002
: 506081

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN

JENIS SATUAN KERJA

: KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 19/02/25 2:31 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc

Tgl Data : 15/2/25 3:53 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,849,950,000	1,699,950,000	1,674,259,000	0	1,674,259,000	98.49	25,691,000
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	240,723,000	275,723,000	272,234,903	0	272,234,903	98.73	3,488,097
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	2,090,673,000	1,975,673,000	1,946,493,903	0	1,946,493,903	98.52	29,179,097
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	2,530,528,000	2,530,528,000	2,492,933,291	0	2,492,933,291	98.51	37,594,709
	JUMLAH BELANJA	4,570,840,000	4,581,360,000	4,348,022,204	0	4,348,022,204	94.91	233,337,796

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 002
SATUAN KERJA : 506081

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 19/02/25 2:31 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc

JENIS SATUAN KERJA : KD

Tgl Data : 15/2/25 3:53 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	614,692,000	614,692,000	606,531,565	0	606,531,565	98.67	8,160,435
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	18,240,000	18,240,000	17,986,600	0	17,986,600	98.61	253,400
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9,600,000	9,600,000	7,324,900	0	7,324,900	76.3	2,275,100
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	117,456,000	120,426,000	109,530,000	0	109,530,000	90.95	10,896,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	4,800,000	4,800,000	0	0	0	0	4,800,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	764,788,000	767,758,000	741,373,065	0	741,373,065	96.56	26,384,935
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	49,717,000	37,759,000	23,675,000	0	23,675,000	62.7	14,084,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	10,200,000	6,600,000	3,645,000	0	3,645,000	55.23	2,955,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	59,917,000	44,359,000	27,320,000	0	27,320,000	61.59	17,039,000
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	98,300,000	95,330,000	92,298,367	0	92,298,367	96.82	3,031,633
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	98,300,000	95,330,000	92,298,367	0	92,298,367	96.82	3,031,633
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	138,000,000	138,000,000	124,574,883	0	124,574,883	90.27	13,425,117
522112	Belanja Langganan Telepon	16,800,000	16,800,000	13,490,687	0	13,490,687	80.3	3,309,313
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	154,800,000	154,800,000	138,065,570	0	138,065,570	89.19	16,734,430
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	280,178,000	290,265,000	285,508,597	0	285,508,597	98.36	4,756,403
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	280,362,000	270,275,000	190,522,721	0	190,522,721	70.49	79,752,279
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	560,540,000	560,540,000	476,031,318	0	476,031,318	84.92	84,508,682
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	363,263,000	395,231,000	369,250,593	0	369,250,593	93.43	25,980,407
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	38,704,000	32,814,000	10,750,000	0	10,750,000	32.76	22,064,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	401,967,000	428,045,000	380,000,593	0	380,000,593	88.78	48,044,407
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,040,312,000	2,050,832,000	1,855,088,913	0	1,855,088,913	90.46	195,743,087
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	439,855,000	554,855,000	546,439,388	0	546,439,388	98.48	8,415,612
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	439,855,000	554,855,000	546,439,388	0	546,439,388	98.48	8,415,612

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA

: 015
: 09
: 002
: 506081

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN

JENIS SATUAN KERJA

: KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 19/02/25 2:31 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc

Tgl Data : 15/2/25 3:53 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,849,950,000	1,699,950,000	1,674,259,000	0	1,674,259,000	98.49	25,691,000
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	240,723,000	275,723,000	272,234,903	0	272,234,903	98.73	3,488,097
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	2,090,673,000	1,975,673,000	1,946,493,903	0	1,946,493,903	98.52	29,179,097
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	2,530,528,000	2,530,528,000	2,492,933,291	0	2,492,933,291	98.51	37,594,709
	JUMLAH BELANJA	4,570,840,000	4,581,360,000	4,348,022,204	0	4,348,022,204	94.91	233,337,796

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
SATUAN KERJA : 506081

KEMENTERIAN KEUANGAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 19/02/25 2:31 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
52	BELANJA BARANG							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	614,692,000	614,692,000	606,531,565	0	606,531,565	98.67	8,160,435
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	18,240,000	18,240,000	17,986,600	0	17,986,600	98.61	253,400
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9,600,000	9,600,000	7,324,900	0	7,324,900	76.3	2,275,100
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	117,456,000	120,426,000	109,530,000	0	109,530,000	90.95	10,896,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	4,800,000	4,800,000	0	0	0	0	4,800,000
521211	Belanja Bahan	22,637,000	22,673,000	11,905,000	0	11,905,000	52.51	10,768,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	10,200,000	6,600,000	3,645,000	0	3,645,000	55.23	2,955,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	98,300,000	95,330,000	92,298,367	0	92,298,367	96.82	3,031,633
522111	Belanja Langganan Listrik	138,000,000	138,000,000	124,574,883	0	124,574,883	90.27	13,425,117
522112	Belanja Langganan Telepon	16,800,000	16,800,000	13,490,687	0	13,490,687	80.3	3,309,313
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	280,178,000	290,265,000	285,508,597	0	285,508,597	98.36	4,756,403
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	280,362,000	270,275,000	190,522,721	0	190,522,721	70.49	79,752,279
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	265,031,000	284,005,000	267,620,757	0	267,620,757	94.23	16,384,243
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	33,704,000	28,814,000	10,150,000	0	10,150,000	35.23	18,664,000
	JUMLAH BELANJA BARANG	1,910,000,000	1,920,520,000	1,741,089,077	0	1,741,089,077	90.66	179,430,923
53	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	439,855,000	554,855,000	546,439,388	0	546,439,388	98.48	8,415,612
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,849,950,000	1,699,950,000	1,674,259,000	0	1,674,259,000	98.49	25,691,000
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	240,723,000	275,723,000	272,234,903	0	272,234,903	98.73	3,488,097
	JUMLAH BELANJA MODAL	2,530,528,000	2,530,528,000	2,492,933,291	0	2,492,933,291	98.51	37,594,709
	JUMLAH RUPIAH MURNI	4,440,528,000	4,451,048,000	4,234,022,368	0	4,234,022,368	95.12	217,025,632
04	PNBP							
52	BELANJA BARANG							
521211	Belanja Bahan	27,080,000	15,086,000	11,770,000	0	11,770,000	78.02	3,316,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	98,232,000	111,226,000	101,629,836	0	101,629,836	91.37	9,596,164
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,000,000	4,000,000	600,000	0	600,000	15	3,400,000
	JUMLAH BELANJA BARANG	130,312,000	130,312,000	113,999,836	0	113,999,836	87.48	16,312,164
	JUMLAH PNBP	130,312,000	130,312,000	113,999,836	0	113,999,836	87.48	16,312,164
	TOTAL	4,570,840,000	4,581,360,000	4,348,022,204	0	4,348,022,204	94.91	233,337,796

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
SATUAN KERJA : 506081

KEMENTERIAN KEUANGAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 19/02/25 2:31 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_satker_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko							
4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	18,597,000	18,597,000	17,285,500	0	17,285,500	92.95	1,311,500
4798	Pengelolaan Aset	174,727,000	185,247,000	149,726,947	0	149,726,947	80.83	35,520,053
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CD	193,324,000	203,844,000	167,012,447	0	167,012,447	81.93	36,831,553
WA	Program Dukungan Manajemen							
4700	Legislasi dan Litigasi	22,088,000	22,088,000	17,636,000	0	17,636,000	79.84	4,452,000
4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	4,190,096,000	4,190,096,000	4,021,741,891	0	4,021,741,891	95.98	168,354,109
4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	20,000,000	20,000,000	12,992,500	0	12,992,500	64.96	7,007,500
4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	15,020,000	15,020,000	14,639,530	0	14,639,530	97.47	380,470
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	4,247,204,000	4,247,204,000	4,067,009,921	0	4,067,009,921	95.76	180,194,079
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	4,440,528,000	4,451,048,000	4,234,022,368	0	4,234,022,368	95.12	217,025,632
04	PNBP							
CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko							
4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	4,267,000	4,267,000	4,016,000	0	4,016,000	94.12	251,000
4798	Pengelolaan Aset	126,045,000	126,045,000	109,983,836	0	109,983,836	87.26	16,061,164
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CD	130,312,000	130,312,000	113,999,836	0	113,999,836	87.48	16,312,164
	JUMLAH BELANJA PNBP	130,312,000	130,312,000	113,999,836	0	113,999,836	87.48	16,312,164
	JUMLAH	4,570,840,000	4,581,360,000	4,348,022,204	0	4,348,022,204	94.91	233,337,796

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
ESELON I : 09 **DITJEN KEKAYAAN NEGARA**
WILAYAH/PROVINSI : 01509002KD **SUMATERA UTARA**
SATUAN KERJA : 506081 **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 19/02/25 2:31 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
4700	Legislasi dan Litigasi							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,000,000	3,000,000	45,000	0	45,000	1.5	2,955,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	3,000,000	3,000,000	45,000	0	45,000	1.5	2,955,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16,688,000	16,688,000	15,191,000	0	15,191,000	91.03	1,497,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	19,088,000	19,088,000	17,591,000	0	17,591,000	92.16	1,497,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	22,088,000	22,088,000	17,636,000	0	17,636,000	79.84	4,452,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4700.EBA	22,088,000	22,088,000	17,636,000	0	17,636,000	79.844	4,452,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4700	22,088,000	22,088,000	17,636,000	0	17,636,000	79.84	4,452,000
4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	614,692,000	614,692,000	606,531,565	0	606,531,565	98.67	8,160,435
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	18,240,000	18,240,000	17,986,600	0	17,986,600	98.61	253,400
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9,600,000	9,600,000	7,324,900	0	7,324,900	76.3	2,275,100
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	117,456,000	120,426,000	109,530,000	0	109,530,000	90.95	10,896,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	4,800,000	4,800,000	0	0	0	0	4,800,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	764,788,000	767,758,000	741,373,065	0	741,373,065	96.56	26,384,935
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	98,300,000	95,330,000	92,298,367	0	92,298,367	96.82	3,031,633
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	98,300,000	95,330,000	92,298,367	0	92,298,367	96.82	3,031,633
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	138,000,000	138,000,000	124,574,883	0	124,574,883	90.27	13,425,117
522112	Belanja Langganan Telepon	16,800,000	16,800,000	13,490,687	0	13,490,687	80.3	3,309,313
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	154,800,000	154,800,000	138,065,570	0	138,065,570	89.19	16,734,430
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	280,178,000	290,265,000	285,508,597	0	285,508,597	98.36	4,756,403

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
ESELON I : 09 **DITJEN KEKAYAAN NEGARA**
WILAYAH/PROVINSI : 01509002KD **SUMATERA UTARA**
SATUAN KERJA : 506081 **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 19/02/25 2:31 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	280,362,000	270,275,000	190,522,721	0	190,522,721	70.49	79,752,279
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	560,540,000	560,540,000	476,031,318	0	476,031,318	84.92	84,508,682
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	79,940,000	79,940,000	79,840,280	0	79,840,280	99.88	99,720
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	81,140,000	81,140,000	81,040,280	0	81,040,280	99.88	99,720
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,659,568,000	1,659,568,000	1,528,808,600	0	1,528,808,600	92.12	130,759,400
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4701.EBA	1,659,568,000	1,659,568,000	1,528,808,600	0	1,528,808,600	92.121	130,759,400
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	439,855,000	554,855,000	546,439,388	0	546,439,388	98.48	8,415,612
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	439,855,000	554,855,000	546,439,388	0	546,439,388	98.48	8,415,612
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,849,950,000	1,699,950,000	1,674,259,000	0	1,674,259,000	98.49	25,691,000
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	240,723,000	275,723,000	272,234,903	0	272,234,903	98.73	3,488,097
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	2,090,673,000	1,975,673,000	1,946,493,903	0	1,946,493,903	98.52	29,179,097
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	2,530,528,000	2,530,528,000	2,492,933,291	0	2,492,933,291	98.51	37,594,709
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4701.EBB	2,530,528,000	2,530,528,000	2,492,933,291	0	2,492,933,291	98.514	37,594,709
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4701	4,190,096,000	4,190,096,000	4,021,741,891	0	4,021,741,891	95.98	168,354,109
4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik							
BMB	Komunikasi Publik							
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	12,048,000	12,048,000	7,797,500	0	7,797,500	64.72	4,250,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	12,048,000	12,048,000	7,797,500	0	7,797,500	64.72	4,250,500
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,152,000	7,152,000	4,445,000	0	4,445,000	62.15	2,707,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	800,000	800,000	750,000	0	750,000	93.75	50,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	7,952,000	7,952,000	5,195,000	0	5,195,000	65.33	2,757,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	20,000,000	20,000,000	12,992,500	0	12,992,500	64.96	7,007,500
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4702.BMB	20,000,000	20,000,000	12,992,500	0	12,992,500	64.963	7,007,500

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
ESELON I : 09 **DITJEN KEKAYAAN NEGARA**
WILAYAH/PROVINSI : 01509002KD **SUMATERA UTARA**
SATUAN KERJA : 506081 **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 19/02/25 2:31 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4702	20,000,000	20,000,000	12,992,500	0	12,992,500	64.96	7,007,500
4704 EBD 52 5241 524111 524113	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal Layanan Manajemen Kinerja Internal BELANJA BARANG Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12,820,000 2,200,000	14,620,000 400,000	14,239,530 400,000	0 0	14,239,530 400,000	97.4 100	380,470 0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	15,020,000	15,020,000	14,639,530	0	14,639,530	97.47	380,470
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	15,020,000	15,020,000	14,639,530	0	14,639,530	97.47	380,470
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4704.EBD	15,020,000	15,020,000	14,639,530	0	14,639,530	97.467	380,470
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4704	15,020,000	15,020,000	14,639,530	0	14,639,530	97.47	380,470
4796 AEF 52 5212 521211	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi Sosialisasi dan Diseminasi BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan	5,809,000	2,905,000	2,180,000	0	2,180,000	75.04	725,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	5,809,000	2,905,000	2,180,000	0	2,180,000	75.04	725,000
5241 524111	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12,788,000	15,692,000	15,105,500	0	15,105,500	96.26	586,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	12,788,000	15,692,000	15,105,500	0	15,105,500	96.26	586,500
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	18,597,000	18,597,000	17,285,500	0	17,285,500	92.95	1,311,500
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4796.AEF	18,597,000	18,597,000	17,285,500	0	17,285,500	92.948	1,311,500
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4796	18,597,000	18,597,000	17,285,500	0	17,285,500	92.95	1,311,500
4798 AAH 52 5241 524111 524113	Pengelolaan Aset Peraturan lainnya BELANJA BARANG Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	50,590,000 7,200,000	53,590,000 4,200,000	52,304,155 700,000	0 0	52,304,155 700,000	97.6 16.67	1,285,845 3,500,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	57,790,000	57,790,000	53,004,155	0	53,004,155	91.72	4,785,845
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	57,790,000	57,790,000	53,004,155	0	53,004,155	91.72	4,785,845
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4798.AAH	57,790,000	57,790,000	53,004,155	0	53,004,155	91.719	4,785,845

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
ESELON I : 09 **DITJEN KEKAYAAN NEGARA**
WILAYAH/PROVINSI : 01509002KD **SUMATERA UTARA**
SATUAN KERJA : 506081 **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 19/02/25 2:31 PM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
ABA 52 5212 521211	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan	 2,140,000	 1,960,000	 680,000	 0	 680,000	 34.69	 1,280,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	2,140,000	1,960,000	680,000	0	680,000	34.69	1,280,000
5241 524111 524113	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	 34,623,000 5,184,000	 36,953,000 3,034,000	 35,925,000 0	 0 0	 35,925,000 0	 97.22 0	 1,028,000 3,034,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	39,807,000	39,987,000	35,925,000	0	35,925,000	89.84	4,062,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	41,947,000	41,947,000	36,605,000	0	36,605,000	87.26	5,342,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4798.ABA	41,947,000	41,947,000	36,605,000	0	36,605,000	87.265	5,342,000
FAE 52 5212 521211	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan	 1,280,000	 1,280,000	 1,247,500	 0	 1,247,500	 97.46	 32,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,280,000	1,280,000	1,247,500	0	1,247,500	97.46	32,500
5241 524111 524113	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	 46,302,000 13,280,000	 49,102,000 10,480,000	 40,336,015 4,200,000	 0 0	 40,336,015 4,200,000	 82.15 40.08	 8,765,985 6,280,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	59,582,000	59,582,000	44,536,015	0	44,536,015	74.75	15,045,985
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	60,862,000	60,862,000	45,783,515	0	45,783,515	75.23	15,078,485
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4798.FAE	60,862,000	60,862,000	45,783,515	0	45,783,515	75.225	15,078,485
FAK 52 5212 521211 521219	Pengelolaan Aset BUN BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan Belanja Barang Non Operasional Lainnya	 1,360,000 7,200,000	 60,000 3,600,000	 0 3,600,000	 0 0	 0 3,600,000	 0 100	 60,000 0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	8,560,000	3,660,000	3,600,000	0	3,600,000	98.36	60,000
5241 524111 524113	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	 4,128,000 1,440,000	 10,268,000 200,000	 10,234,277 200,000	 0 0	 10,234,277 200,000	 99.67 100	 33,723 0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	5,568,000	10,468,000	10,434,277	0	10,434,277	99.68	33,723

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
ESELON I : 09 **DITJEN KEKAYAAN NEGARA**
WILAYAH/PROVINSI : 01509002KD **SUMATERA UTARA**
SATUAN KERJA : 506081 **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 19/02/25 2:31 PM
Halaman : 5
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	14,128,000	14,128,000	14,034,277	0	14,034,277	99.34	93,723
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4798.FAK	14,128,000	14,128,000	14,034,277	0	14,034,277	99.337	93,723
UAK 52 5212 521211	Pengelolaan Aset BUN BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan	0	4,420,000	0	0	0	0	4,420,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	0	4,420,000	0	0	0	0	4,420,000
5241 524113	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	6,100,000	300,000	0	300,000	4.92	5,800,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	0	6,100,000	300,000	0	300,000	4.92	5,800,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	0	10,520,000	300,000	0	300,000	2.85	10,220,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4798.UAK	0	10,520,000	300,000	0	300,000	2.852	10,220,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4798	174,727,000	185,247,000	149,726,947	0	149,726,947	80.83	35,520,053
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	4,440,528,000	4,451,048,000	4,234,022,368	0	4,234,022,368	95.12	217,025,632
04 4796 AEF 52 5212 521211	PNBP Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi Sosialisasi dan Diseminasi BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan	3,840,000	3,840,000	3,720,000	0	3,720,000	96.88	120,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	3,840,000	3,840,000	3,720,000	0	3,720,000	96.88	120,000
5241 524111	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa	427,000	427,000	296,000	0	296,000	69.32	131,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	427,000	427,000	296,000	0	296,000	69.32	131,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	4,267,000	4,267,000	4,016,000	0	4,016,000	94.12	251,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4796.AEF	4,267,000	4,267,000	4,016,000	0	4,016,000	94.118	251,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4796	4,267,000	4,267,000	4,016,000	0	4,016,000	94.12	251,000
4798 BAE 52 5212 521211	Pengelolaan Aset Pelayanan Publik kepada UMKM BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan	9,496,000	9,496,000	8,050,000	0	8,050,000	84.77	1,446,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
ESELON I : 09 **DITJEN KEKAYAAN NEGARA**
WILAYAH/PROVINSI : 01509002KD **SUMATERA UTARA**
SATUAN KERJA : 506081 **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 19/02/25 2:31 PM
Halaman : 6
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	9,496,000	9,496,000	8,050,000	0	8,050,000	84.77	1,446,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29,504,000	30,504,000	27,549,900	0	27,549,900	90.32	2,954,100
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,000,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	30,504,000	30,504,000	27,549,900	0	27,549,900	90.32	2,954,100
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	40,000,000	40,000,000	35,599,900	0	35,599,900	89	4,400,100
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4798.BAE	40,000,000	40,000,000	35,599,900	0	35,599,900	89	4,400,100
BAH	Pelayanan Publik Lainnya							
52	BELANJA BARANG							
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24,045,000	24,045,000	23,581,000	0	23,581,000	98.07	464,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,000,000	2,000,000	400,000	0	400,000	20	1,600,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	26,045,000	26,045,000	23,981,000	0	23,981,000	92.08	2,064,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	26,045,000	26,045,000	23,981,000	0	23,981,000	92.08	2,064,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4798.BAH	26,045,000	26,045,000	23,981,000	0	23,981,000	92.075	2,064,000
FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	13,744,000	1,750,000	0	0	0	0	1,750,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	13,744,000	1,750,000	0	0	0	0	1,750,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	44,256,000	56,250,000	50,202,936	0	50,202,936	89.25	6,047,064
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,000,000	2,000,000	200,000	0	200,000	10	1,800,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	46,256,000	58,250,000	50,402,936	0	50,402,936	86.53	7,847,064
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	60,000,000	60,000,000	50,402,936	0	50,402,936	84	9,597,064
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4798.FAE	60,000,000	60,000,000	50,402,936	0	50,402,936	84.005	9,597,064
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4798	126,045,000	126,045,000	109,983,836	0	109,983,836	87.26	16,061,164
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 04	130,312,000	130,312,000	113,999,836	0	113,999,836	87.48	16,312,164
	JUMLAH BELANJA	4,570,840,000	4,581,360,000	4,348,022,204	0	4,348,022,204	94.91	233,337,796

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
WILAYAH/PROVINSI

: 015
: 09
: 0700

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
SUMATERA UTARA

Kode Lap
Tanggal
Halaman
Prg ID

: LRA.P.E1.1
: 19/02/25 2:31 PM
: 1
: lap_lra_pen_akun_satker

SATUAN KERJA

: 506081

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	1,289,000	0	1,289,000	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	323,000	4,619,000	0	4,619,000	1430.03
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	8,585,000	14,430,000	0	14,430,000	168.08
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	8,908,000	20,338,000	0	20,338,000	228.31
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	1,000,000	0	1,000,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	0	1,000,000	0	1,000,000	
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	1,093,618,000	1,769,546,152	0	1,769,546,152	161.81
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	620,275,000	907,216,586	0	907,216,586	146.26
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	2,202,000	1,170,935	0	1,170,935	53.18
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	1,716,095,000	2,677,933,673	0	2,677,933,673	156.05
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	8,371,295	0	8,371,295	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	8,371,295	0	8,371,295	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	113,488,025	0	113,488,025	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	113,488,025	0	113,488,025	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	1,725,003,000	2,821,130,993	0	2,821,130,993	163.54

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

	JUMLAH PENDAPATAN	1,725,003,000	2,821,130,993	0	2,821,130,993	163.54
--	-------------------	---------------	---------------	---	---------------	--------

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Desember 2024

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (07.10) SUMATERA UTARA / KAB. ASAHAN
 Satuan Kerja : (506081) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN
 Tgl, No. SP DIPA : 28 November 2023 , DIPA-015.09.2.506081/2024
 Tahun Anggaran : 2024
 KPPN : (076) Tanjung Balai Asahan
 Alamat dan No Telp : Jl. Prof. H.M. Yamin, S.H. No.47, Kisaran , 062341660 ,

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 120.649.563,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00132/SSPDT/506081/2024

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	828.246.179,00	4.713.184.293,00	5.420.780.909,00	120.649.563,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	828.246.179,00	4.713.184.293,00	5.420.780.909,00	120.649.563,00
B.	BP Selain Kas	828.246.179,00	4.713.184.293,00	5.420.780.909,00	120.649.563,00
	1. BP PNBP	0,00	193.495.375,00	193.495.375,00	0,00
	2. BP DPK	828.246.179,00	4.399.716.418,00	5.107.313.034,00	120.649.563,00
	3. BP Pajak	0,00	119.972.500,00	119.972.500,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2. Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	120.649.563,00 ^(*)
3. Jumlah Kas	Rp	120.649.563,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	120.649.563,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp	120.649.563,00 ⁽⁻⁾
3. Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1. Saldo Awal	Rp	0,00
2. Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	313.467.875,00 ^(*)
3. Jumlah Penerimaan Negara	Rp	313.467.875,00
4. Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	313.467.875,00 ⁽⁻⁾
Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	193.495.375,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	459.662.851,00
3. Selisih	Rp	- 266.167.476,00

VI. Pembukuan dan fisik kas telah diperiksa oleh KPA dengan hasil sebagai berikut:

1. Selisih Kas (saldo akhir III.3) : 0,00-
2. Selisih Pembukuan (V.3) : - 266.167.476,00 karena Terdapat penerimaan negara yang penyetorannya tidak melalui rekening bendahara penerimaan yaitu Pendapatan Bea Lelang Pegadaian sebesar Rp247.898.476; bea permohonan lelang sebesar Rp7.650.000; bea batal lelang sebesar Rp4.000.000 ; Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp1.500.000; Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar 4.619.000, dan Pendapatan Jasa Lainnya sebesar Rp500.000

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



KAB. ASAHAN , 07 Januari 2025

Bendahara Penerimaan

RIZKI HARNI MANURUNG

NIP 199706282018012001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN
JALAN PROF. H. M. YAMIN S.H. NO. 47 KODE POS 21219 TELEPON (0623) 41660 FAKSIMILE 0623- 42520

**LAPORAN POSISI SALDO KAS (KARTAL DAN GIRAL) PADA BENDAHARA PENERIMAAN KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN
Per 31 Desember 2024**

No.	Keterangan	Saldo per 31 Desember 2024	
A.	Dana Milik Pemerintah/DJKN yang Belum Disetorkan ke Kas Negara terdiri atas :		
1	Biaya Administrasi PPN	Rp	0,00
2	Bea Lelang	Rp	0,00
3	Jasa Giro setelah dikurangi pajak (Sebelum TNP)	Rp	0,00
4	Hasil Bersih Lelang BMN Milik KPKNL	Rp	0,00
5	Lain-lain (Wanprestasi & Biaya Kutipan Risalah Pengganti)	Rp	0,00
5a.	Wanprestasi (Rp0,00)		
5b.	Biaya Kutipan Risalah Pengganti (Rp0,00)		
6	PPh	Rp	
Jumlah A		Rp	0,00
B.	Dana Milik BUMN/Swasta/Pihak ketiga lainnya yang belum dipindahbukukan /ditransfer ke Pihak yang berhak terdiri dari :		
1	Hasil Bersih Lelang Milik BUMN atau Swasta	Rp	0,00
2	Hasil Bersih Lelang Eksekusi KPKNL (Penyerah Piutang BUMN dan atau Swasta)	Rp	0,00
3	Kelebihan di Rekening Penampungan Lelang	Rp	0,00
4	Hasil Bersih Lelang Barang Eksekusi KPKNL (Penyerah Piutang Instansi Pemerintah)	Rp	0,00
5	Hasil Bersih Lelang Barang Sitaan dari Dirjen Bea Cukai/Kejaksaan/ Kepolisian/Instansi Pemerintah Lainnya	Rp	0,00
6	Hasil Bersih Lelang Eksekusi dan Non Eksekusi Wajib Milik Kementerian/Lembaga	Rp	0,00
7	Hak Penyerah Piutang yang Belum Dipindahbukukan ke Penyerah Piutang	Rp	0,00
8	Uang Jaminan Lelang yang Belum Diambil	Rp	112.707.000,00
9	Kelebihan di Rekening Penampungan Piutang	Rp	0,00
10	Lain-lain Lelang	Rp	14,00
11	Lain-lain Piutang	Rp	7.942.548,54
Jumlah B		Rp	120.649.562,54
C	Dana yang Masih dalam Proses Identifikasi dan Konfirmasi	Rp	0,00
D	Dana yang Berasal dari Kredit Nota dan Setoran yang Tidak Jelas	Rp	0,00
JUMLAH A+B+C+D		Rp	120.649.562,54

Mengetahui:

Kepala Seksi Hukum dan Informasi /
Atasan Langsung Bendahara Penerimaan,

Bendahara Penerimaan,



Ditandatangani secara elektronik
Josep May Hardi Ginting



Ditandatangani secara elektronik
Rizki Harni Manurung





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN
JALAN PROF. H. M. YAMIN S.H. NO. 47 KODE POS 21219 TELEPON (0623) 41660 FAKSIMILE 0623- 42520

BERITA ACARA REKONSILIASI
NOMOR BAR-04/KNL.0203/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal Tujuh, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di KPKNL Kisaran, kami masing-masing.

1. Sari Solikhati, Operator GLP, selanjutnya disebut Pihak Pertama

dan

2. Frans Bonar Tagor Sianturi, Petugas Pelaporan Piutang Negara, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

telah melaksanakan rekonsiliasi internal Pelaporan PNBPN yang Berasal dari Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara antara data PNBPN OMSPAN dengan data PNBPN Aplikasi *Focus PN* periode sampai dengan Triwulan IV (terhitung 01 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024).

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan data PNBPN yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dengan hasil sebagai berikut:

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No	Uraian	OMSPAN	Focus PN	Selisih
1.	MAP 425785 PNBP Biad PN	Rp1.170.935,00	Rp1.170.935,00	Rp0,00

Hasil rekonsiliasi internal secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atasan Petugas Pelaporan
Piutang Negara



Ditandatangani secara elektronik

Ahmad Rifai

Dibuat di Kisaran
Atasan Operator GLP



Ditandatangani secara elektronik

Muhammad Iqbal

Menyetujui
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik

Melly Maiesta



LAMPIRAN

Berita Acara Kepala KPKNL Kisaran

Nomor : BAR- 04/KNL.0203/2024

Tanggal : 07 Januari 2025

Laporan Hasil Rekonsiliasi

Dari hasil Rekonsiliasi Internal Laporan data PNBP OMSPAN dengan data PNBP *Focus PN* sampai dengan periode pelaporan dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PNBP pelaksanaan lelang

OMSPAN

MAP 425785 Biad Piutang Negara : Rp1.170.935,00

Focus PN

MAP 425785 Biad Piutang Negara : Rp1.170.935,00



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN
JALAN PROF. H. M. YAMIN S.H. NO. 47 KODE POS 21219 TELEPON (0623) 41660 FAKSIMILE 0623- 42520

BERITA ACARA REKONSILIASI
NOMOR BAR-02/KNL.0203/2025

Pada hari ini, Jumat tanggal tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima (03-01-2025) bertempat di KPKNL Kisaran, kami masing-masing.

1. Sri Hartati, Operator GLP, selanjutnya disebut Pihak Pertama

dan

2. Puspita Sari Pinem, Petugas Pelaporan Lelang, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

telah melaksanakan rekonsiliasi internal Pelaporan PNPB yang Berasal dari Bea Lelang Pegadaian antara data PNPB OMSPAN dengan data PNPB *sharing folder dropbox* lelang periode 31 Desember 2024.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan data PNPB yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dengan hasil sebagai berikut:

No	Uraian	OMSPAN	Dropbox lelang	Selisih
1.	MAP 425784 Bea Lelang Pegadaian	Rp907.216.586	Rp907.216.586	Rp0

Hasil rekonsiliasi internal secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atasan Petugas Pelaporan Lelang

Dibuat di Kisaran
Atasan Operator GLP



Ditandatangani secara elektronik
Muhammad Iqbal



Melly Maiesta

Menyetujui
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik





Ditandatangani secara elektronik
Muhammad Iqbal



LAMPIRAN

Berita Acara Kepala KPKNL Kisaran

Nomor : BAR-02/KNL.0203/2025

Tanggal : 03 Januari 2025

Laporan Hasil Rekonsiliasi

Dari hasil Rekonsiliasi Internal Laporan data PNBP OMSPAN dengan data PNBP Dropbox lelang sampai dengan periode pelaporan dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PNBP pelaksanaan lelang

OMSPAN

MAP 425784 Bea Lelang Pegadaian : Rp907.216.586

Dropbox Lelang

MAP 425784 Bea Lelang Pegadaian : Rp907.216.586

2. Penjelasan atas Selisih

: tidak terdapat selisih



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN
JALAN PROF. H. M. YAMIN S.H. NO. 47 KODE POS 21219 TELEPON (0623) 41660 FAKSIMILE 0623- 42520

BERITA ACARA REKONSILIASI
NOMOR BAR-01/KNL.0203/2025

Pada hari ini, Jumat tanggal tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima (03-01-2025) bertempat di KPKNL Kisaran, kami masing-masing.

1. Sri Hartati, Operator GLP, selanjutnya disebut Pihak Pertama

dan

2. Puspita Sari Pinem, Petugas Pelaporan Lelang, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

telah melaksanakan rekonsiliasi internal Pelaporan PNBPN yang Berasal dari Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I antara data PNBPN OMSPAN dengan data PNBPN sharing folder dropbox lelang periode 31 Desember 2024.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan data PNBPN yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dengan hasil sebagai berikut:

No	Uraian	OMSPAN	Dropbox lelang	Selisih
1.	MAP 425782 Bea Lelang PL I	Rp1.769.546.152	Rp1.769.546.152	Rp0

Hasil rekonsiliasi internal secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atasan Petugas Pelaporan Lelang



Ditandatangani secara elektronik
Muhammad Iqbal

Dibuat di Kisaran
Atasan Operator GLP



Ditandatangani secara elektronik
Muhammad Iqbal

Menyetujui
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Melly Maiesta





Ditandatangani secara elektronik
Melly Maiesta



LAMPIRAN

Berita Acara Kepala KPKNL Kisaran

Nomor : BAR-01/KNL.0203/2025

Tanggal : 03 Januari 2025

Laporan Hasil Rekonsiliasi

Dari hasil Rekonsiliasi Internal Laporan data PNBP OMSPAN dengan data PNBP Dropbox lelang sampai dengan periode pelaporan dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PNBP pelaksanaan lelang

OMSPAN

MAP 425782 Bea Lelang PL I : Rp1.769.546.152

Dropbox Lelang

MAP 425782 Bea Lelang PL I : Rp1.769.546.152

2. Penjelasan atas Selisih

: tidak terdapat selisih